

PERAN DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN SIDOARJO DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BERKONSTITUSI PADA KADER

M. Muzzaky Alfikri

14040254012 (PPKn, FISH, UNESA) zakry.1st@gmail.com

Agus Satmoko Adi

0016087208 (PPKn, FISH, UNESA) agussatmoko@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran DPC PKB dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi melalui program kegiatan yang dilihat dalam pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan jaring aspirasi masyarakat. Pada Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ada empat orang, yakni wakil ketua bidang kaderisasi, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota partai. Teknik analisis data dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, deskripsi dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan yakni teori Biddle & Thomas. Keabsahan data diperoleh dari teknik triangulasi teknik dan sumber dalam pengumpulan data. Kendala yang dihadapi pengurus DPC PKB antara lain perkembangan pola pikir kader, minimnya dana parpol dan maraknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa DPC PKB berperan dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi dengan dilihat dari kegiatan pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan jaring aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Kesadaran Berkonstitusi.

Abstract

This study was aimed to observe the role of DPC PKB Sidoarjo in improving constitutional awareness through the following program : the first-level cadre education, the four-pillar of nationality socialization, and *Jaring Aspirasi Masyarakat* [literally means 'net communities' aspirations : visiting communities, listen to their aspirations in order to determine priorities and allocate funds]. This research uses qualitative-descriptive method. Data were collected using in-depth interview techniques, observation and documentation. There researcher had interviewed four informants they were the vice chief, the secretary, the vice secretary and a member of the party. Data analysis techniques in this research are data collection, data reduction, description and conclusion withdrawal. The theory used is the theory of Biddle & Thomas. The validity of data is obtained from triangulation technique and the authority in data collection. DPC PKB deals with some problems like cadre's mindset development, small amount of political party funding, and huge number of corruption cases. From the results obtained, showed that DPC PKB plays a role in improving constitutional awareness through the first-level cadre education, the four-pillar of nationality socialization, and *Jaring Aspirasi Masyarakat* program.

Keywords: Role, Constitutional Awareness.

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) atau dapat disebut dengan konstitusi menempati tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan suatu negara serta merupakan hukum tertinggi dan mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi tetapi merupakan pedoman konstitusional bagi para warga Negara atau rakyat banyak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Konstitusi adalah naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat dan merupakan kontrak sosial yang dibawah setiap warga negara dalam membangun paham kedaulatan rakyat. UUD NRI 1945 akan dapat membumi dan dilaksanakan dengan baik, apabila ada pemahaman dan kesadaran konstitusional dari segenap warga negara sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Dengan kata lain membangun kesadaran berkonstitusi tidak lain adalah upaya untuk memfungsikan UUD NRI 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesadaran berkonstitusi menjadi unsur penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, aman dan nyaman. Pernyataan tersebut sama dengan yang ada dalam

pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke IV, mengenai fungsi negara Indonesia;

“Untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia.”

Kesadaran berkonstitusi semakin dibutuhkan di era demokrasi seperti saat ini. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menjamin hak individu sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), namun dalam pelaksanaannya terkadang kurang memperhatikan kepentingan orang lain. Keadaan tersebut jika dibiarkan akan terjadi kekacauan antar individu maupun antar kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga hal tersebut akan mengganggu ketertiban dan jalannya pemerintahan suatu negara. Di dalam suasana demokrasi diperlukan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie (2007:13) mengemukakan:

“Agar setiap lembaga dan segenap warga Negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Konstitusi sebagai hukum dasar negara sangat dibutuhkan untuk mengendalikan keadaan apabila terjadi kekacauan dalam suatu negara, pendapat Jimly Asshiddiqie tersebut memandang bahwa konstitusi merupakan pedoman dalam menjalankan negara. Pedoman berupa konstitusi, dibentuk dan disusun berdasarkan kesepakatan dari seluruh warga negara berdasarkan asas perwakilan, yaitu melalui wakil rakyat yang berada di lembaga legislatif, sehingga tidak ada alasan bagi warga negara untuk tidak taat terhadap konstitusi. Konstitusi juga sebagai wujud kesepakatan antara pemerintah dengan warga negara, sehingga jika masing-masing pihak memenuhi kesepakatan tersebut akan tercipta ketertiban hukum.

Begitu pun juga sebaliknya. Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Konstitusi harus secara sadar diinternalisasi dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan. Untuk

menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman seperti itu menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesadaran berkonstitusi setiap warga negara merupakan sesuatu yang diidam-idamkan oleh negara mana pun, namun hal itu tidak mudah, karena sadar atau taat pada konstitusi merupakan sebuah pembatasan kebebasan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu sebagai warga negara. Budaya sadar berkonstitusi tercipta tidak hanya sekedar mengetahui norma dasar dalam konstitusi. Lebih dari itu, juga dibutuhkan pengalaman nyata untuk melihat dan menerapkan konstitusi dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi adalah suatu proses panjang dan berkelanjutan.

Selama ini kesadaran berkonstitusi dari warga negara kurang mendapatkan perhatian dalam pengembangannya, hal ini sebagai salah satu dampak negatif dari kesalahan dalam menempatkan dan memperankan konstitusi. Menurut Suwama (2001:35), “Konstitusi dijadikan substitusi indoktrinasi sehingga konstitusi dijauhkan dari wacana kajian publik, sehingga terjadi upaya sakralisasi konstitusi yang sudah barang tentu sangat bertentangan dengan fungsi dan peran konstitusi dalam negara hukum yang demokratis”.

Jika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan konstitusi.

Sebagai pengawal demokrasi sudah selayaknya partai politik atau kader partai untuk mempunyai kesadaran berkonstitusi. Sekarang ini partai politik dan kader partai sedang dalam sorotan publik karena banyak kader partai yang tidak menunjukkan bahwa para kader memiliki kesadaran berkonstitusi. Banyak kader partai yang terjerat kasus pidana seperti korupsi serta pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu atau pilkada. Sebagai gambaran awal masih banyak dijumpai berbagai pelanggaran tata pelaksanaan konstitusi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contoh data pelanggaran partai politik baik yang menyangkut kader dalam

pemilihan umum tahun 2009, Diakses tanggal 15 Januari 2018.

Tabel 1

Data kader Partai Politik yang tidak taat berkonstitusi.

No.	Indeks Korupsi Parpol (ICW, 2002-2014)		Kader tersangkut korupsi (kpk, 2005-2014)	
	Parpol	Nilai	Parpol	Jumlah kader
1.	PDIP	7,7	Golkar	40
2.	PAN	5,5	PDIP	27
3.	Golkar	4,9	Demokrat	17
4.	PKB	3,3	PAN	8
5.	PPP	2,7	PPP	8
6.	PKPI	2,1	PKB	2
7.	Gerinda	1,9	Gerinda	2
8.	Demokrat	1,7	PKPI	1
9.	PBB	1,6	PBB	1
10	Hanura	1,5	PKS	1
11.	PKS	0,3		

Sumber. ICW, KPK, Metro TV, data diolah (kompasiana.2016)

Pelanggaran-pelanggaran di atas, disebabkan kurang berjalannya budaya sadar berkonstitusi pada kader partai, sehingga diperlukan peranan partai politik dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai. Seluruh partai politik yang ada hampir semuanya masih mempunyai pekerjaan rumah dalam membina dan membimbing kader untuk dapat berpolitik dengan baik. Kesadaran berkonstitusi sangat esensial bagi seluruh warga negara Indonesia. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk memberikan pemahaman tentang substansi UUD NRI Tahun 1945 yang telah diamandemen. Konstitusi negara Republik Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus. Salah satunya melalui peran serta partai politik.

Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengekspresikan serta mengaktualisasi haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat sebagai hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sementara fungsi partai politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, antara lain adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi dari partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan salah satu partai yang berasaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Partai Kebangkitan Bangsa sebagai suatu organisasi sosial politik memiliki tujuan sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga yaitu: (a) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. (b) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material, spiritual. (c) Mewujudkan tatanan politik nasional dan demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah. Sedangkan untuk mencapai tujuannya tersebut, partai kebangkitan bangsa melakukan usaha-usaha yang dapat diimplementasikan dan meliputi berbagai bidang seperti, bidang agama, bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang social budaya, bidang pendidikan, bidang pertahanan.

Di ruang lingkup Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112 5' dan 112 9' Bujur Timur dan antara 7 3' dan 7 5' Lintang Selatan. Luas kabupaten Sidoarjo adalah 719,63 km². Penduduk sekitar 1.945.252 jiwa (2010). Dengan berbagai permasalahan dan realitas yang ada Partai Kebangkitan Bangsa juga hadir di Sidoarjo dengan berbagai kader-kadernya yang masuk dan menghiasi di bidang-bidang pemerintaha. Bahkan PKB di wilayah Sidoarjo mayoritas didukung dan mendapat suara dukungan yang tinggi. Ini yang menjadikan komunikasi politik baik dari pengurus PKB Sidoarjo dengan masyarakat berjalan dengan baik sehingga dapat diterima oleh berbagai pihak.

Tabel 2

Perolehan suara partai politik DPRD Sidoarjo pada 2014

No.	Nama Parpol	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1	PKB	263.630	13
2	PDI – P	151.863	8
3	GERINDRA	137.495	7
4	PAN	119.338	7
5	DEMOKRAT	72.345	4
6	GOLKAR	68.117	5
7	PKS	60.539	3
8	NASDEM	38.036	1
9	HANURA	26.208	-
10	PPP	16.993	1
11	PBB	14.795	1
12	PKPI	6.455	-
	TOTAL	975.814	50

Sumber: kpud-sidoarjo.go.id

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa partai kebangkitan bangsa kabupaten Sidoarjo mendapat mayoritas suara di kursi parlemen yang menempatkan 13

kadernya atau sekitar 26% kursi di DPRD Sidoarjo. Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu partai politik yang memiliki andil dalam pembangunan dan sistem pemerintahan, tata kelola kota bagi masyarakat terutama bagi kader partainya sehingga mampu berpartisipasi di bidang politik secara langsung menjadi penyambung lidah rakyat dan menyampaikan informasi melalui lembaga perwakilan dalam melaksanakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan pada Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian tentang kesadaran berkonstitusi dengan judul “Peran Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sidoarjo dalam Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi (*Constitutional Awareness*) Pada Kader Partai. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Untuk mendeskripsikan peran partai politik (PKB) dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada kader partainya dan Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi yang dilakukan oleh partai politik di DPC PKB Kab. Sidoarjo.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif suatu metode untuk yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dan biasanya dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2013:4). Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Desain penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang (Sugiyono, 2010:14). Tempat penelitian dilakukan di DPC PKB Sidoarjo yang beralamat di Jl. Erlangga, Perum Puri Erlangga No. 5-6, Kel Sidokare, Kec Sidoarjo Kota pada Bulan April-Juni Tahun 2018.

Pengambilan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sample* (sample bertujuan). Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, dengan memilih subjek penelitian dengan beberapa pertimbangan yang didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu (Sugiyono, 2013:300-304). Karakteristik yang pertama salah satu Pengurus DPC

PKB Kabupaten Sidoarjo yang menjabat sebagai wakil ketua bidang kaderisasi yakni bapak H. Nur Ahmad Syaifuddin, S.H. Yang kedua sekretaris DPC PKB Kabupaten Sidoarjo yakni Bapak H. Abdillah Nasih. Yang ketiga Saudara Choirul Mu’minin S.Pd selaku wakil sekretaris DPC PKB, serta Saudara M. Ainun Nadjib M.Pd selaku perwakilan dari kader. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yakni mengenai peran yang dilakukan DPC PKB dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi dan kendala yang di alami. DPC PKB Berperan dalam melaksanakan tiga program kegiatan diantaranya Pendidikan Kader Pertama, Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dan Jaring Aspirasi Masyarakat. Dimana tiga Program yang dibuat DPC PKB dijadikan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi.

1. Pendidikan Kader Pertama

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai organisasi sosial politik yang terjun langsung ke masyarakat untuk membantu dalam masalah sosial sehingga akan mengandalkan anggota atau kadernya. Beberapa kegiatan telah dilakukan DPC PKB Sidoarjo dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada anggota atau kader. Dari kegiatan yang telah dilakukan DPC PKB sendiri, menjadikan masyarakat memberikan harapannya kepada DPC PKB agar tetap bisa menambah kepeduliannya kepada anggota atau kader yang nanti saling berinteraksi dengan masyarakat, memberikan edukasi kepada anggota atau kader mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran berkonstitusi.



Gambar 1

Pengurus DPC PKB Sidoarjo

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Nur Ahmad Syaifuddin wakil ketua DPC PKB bidang kaderisasi yang menyatakan bahwa.

“Saat ini analisis saya dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada anggota atau kader

perlu dengan memberikan bekal dan pelatihan yakni bisa dengan pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan jaring aspirasi masyarakat. Yang mana dari ketiga program kegiatan tersebut dilakukan oleh DPC PKB sebagaimana fungsinya dalam UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik sebagai bagian dari pendidikan politik. Dari kegiatan tersebut pendidikan kader pertama diharapkan dapat menjadi solusi dari regenerasi anggota atau kader. Sedangkan sosialisasi empat pilar kebangsaan ini ditujukan untuk anggota atau kader mengingat pentingnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir jaring aspirasi masyarakat ini adalah system monitoring dan pengawasan dari DPC PKB terhadap anggota atau kader dalam menyerap aspirasi dan keluhan dari masyarakat.” (13 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Ahmad Syaifuddin, selaku Wakil Ketua DPC PKB bidang kaderisasi tersebut, bahwa dalam upayanya meningkatkan kesadaran berkonstitusi kepada anggota atau kader. Oleh karenanya perlu diadakan program kegiatan yang mampu memberikan bekal dan edukasi bagi anggota atau kader. Didalam program kegiatan DPC PKB Sidoarjo utamanya yang terkait dengan meningkatkan kesadaran berkonstitusi hanya menekankan pada 3 hal. Pertama, dengan pendidikan kader pertama (PKP). Kedua, sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan yang ketiga, jaring aspirasi masyarakat.

Kegiatan pendidikan kader pertama menjadi elemen penting dan konsolidasi nasional dari AD/ART PKB hasil muktamar terakhir di Empire Palace Surabaya. Bahwa pendidikan dasar pertama ini tidak hanya penting dalam meregenerasi anggota atau kader, namun juga sebagai kebutuhan partai untuk dapat menghidupkan kembali struktur PKB diseluruh wilayah kecamatan maupun ranting di Kabupaten Sidoarjo.

Banyak cara yang dilakukan DPC PKB dalam melaksanakan pendidikan kader pertama. Dilihat dari rencana pelaksanaan terlebih dahulu. Kemudian baru DPC PKB melakukan tindakan dalam menyediakan tempat atau gedung yang layak. Ketika telah terjadi kesepakatan tempat, semua akan memusyawarahkan hal lain. Salah satu cara yang dilakukan DPC PKB adalah ketika menyiapkan tempat pelaksanaan adalah dengan menyiapkan keperluan sehari sebelum pelaksanaan, seperti menyiapkan lcd proyektor untuk menunjang materi, konsumsi untuk menunjang peserta dll. Kemudian dari tim DPC PKB terjun langsung ke lokasi untuk memastikan pendidikan kader pertama tersebut berjalan lancar. Setelah itu DPC PKB mengambil keputusan untuk pendidikan kader pertama diadakan pendalaman materi tentang sejarah, ideology dan

platform PKB, geneologi politik NU. Jadi setiap materi nanti aka nada yang menanganinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Choirul Mukminin ketua pelaksana pendidikan kader pertama yang menyatakan bahwa.

“Kalau menurut saya ya mas, DPC PKB sendiri lebih ke-tindakannya melalui kegiatan-kegiatannya mas. Jadi kita liat dulu kalau misalkan ditahun sebelumnya sudah berjalan baik. Kami lanjutkan seperti konsep sebelumnya. Materi-materi yang diberikan juga akan menyinggung dan mengungkap isu-isu terkini yang nantinya akan lebih bermanfaat diaplikasikan ke kader. Kalau DPC PKB sendiri juga lebih ke berbenah diri sendiri dulu mas, sebelum terjun ke masyarakat untuk melakukan kegiatan dimasyarakat. Pokoknya kita mulai dari yang kecil sebelum kita ke hal yang lebih besar gitu mas.” (14 April 2018)



Gambar 2 Kegiatan Pendidikan Kader Pertama

Pada gambar tersebut tampak instruktur menyampaikan materi. Pendidikan kader pertama merupakan sistem kaderisasi yang dirancang dan diterapkan di Partai Kebangkitan Bangsa untuk menjadikan sebagai partai yang modern dan memiliki landasan akidah yang kuat, yakni akidah aswaja (Ahlussunah Wal Jama'ah). DPC PKB kabupaten Sidoarjo memperuntukkan program PKP bagi seluruh anggota atau kader dilevel kecamatan dan ranting baik struktural maupun non struktural.

Bapak Nur Ahmad Syaifuddin lebih lanjut juga mengatakan bahwa:

“Pendidikan kader pertama bertujuan menyiapkan kader atau anggota yang dapat diandalkan dalam setiap kesempatan. Pendidikan kader pertama diisi dengan beragam materi oleh instruktur seperti historitas dan kontribusi NU terhadap NKRI, politik genosida NU, sejarah, ideologi dan platform PKB, citra diri kader, Gus Dur dan lain-lain.” (13 April 2018).

Cara penyampaian materi ini dilakukan oleh instruktur yang ditunjuk oleh DPC PKB secara langsung kepada kader dengan metode tatap muka. Seperti salah satu contoh dalam penyampaian materi sejarah, ideology dan platform PKB instruktur menyampaikan keterkaitan NU dan PKB yang tidak bisa dilepaskan dari historitas NU. Sejarah kelahiran PKB dimulai sehari setelah orde baru lengser, PBNU kebanjiran usulan dari warga NU di

seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam. Dan pada akhirnya tanggal 23 Juli 1998, PKB dideklarasikan di Ciganjur. diputuskan kerangka konstitusi ideology PKB yang terdiri dari Mabda' siyasi, AD PKB, ART PKB, peraturan partai, dan keputusan partai. Sebagai partai yang dilahirkan oleh NU, maka PKB mengemban mandate ideologis NU di ranah politik. Karena itu, maka dengan membicarakan ideology PKB harus dimulai dengan menelusuri sejarah dan ideologi NU. Sebagai bagian dari program tiap tahun sistem kaderisasi yang dilakukan. Pendidikan kader pertama tahun ini dilaksanakan pada tanggal 26-27 Februari. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Abdillah Nasih selaku sekretaris DPC PKB Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

“Untuk kegiatan pendidikan kader pertama ya mas, DPC PKB Sidoarjo sudah sering melakukan kegiatan ini, setiap tahun malahan mas. Untuk tahun ini kita sudah melaksanakan di akhir february pada tanggal 26-27 Februari tergantung dari kesepakatan pengurus dan dari beberapa pertimbangan semuanya. Pendidikan kader juga merupakan bagian untuk memperkuat sistem kaderisasi di internal partai dan sebagai langkah awal bagi anggota atau kader agar memahami arah dan tujuan partai. Harapannya yang utama adalah dengan adanya kegiatan pendidikan kader pertama dapat menumbuhkan kesadaran berkonstitusi. jadi nggak Cuma anggota atau kader DPC saja yang meningkatkan kesadaran berkonstitusi namun juga kita semua masyarakat harus juga ikut dalam menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. (25 April 2018).

Setiap tahun ke tahun DPC PKB selalu melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kader pertama. Dimana setiap kegiatan yang diadakan DPC PKB tidak asal dilakukan tanpa ada tujuan dan harapan dari DPC PKB sendiri. Kegiatan DPC PKB dilakukan juga berdasarkan atas isu atau permasalahan yang ada. DPC PKB juga mempertimbangkan isu-isu yang terjadi saat ini, dengan mengadakan pertemuan besar dari semua pengurus untuk membahas masalah yang terjadi saat ini.

Jadi tidak hanya dari lingkup DPC saja yang melakukan pertemuan untuk membahas masalah kesadaran berkonstitusi yang terjadi namun juga seluruh organisasi sosial politik baik yang ada di daerah maupun dipusat. Kemudian dari situ partai politik dan DPC PKB khususnya berupaya untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi yang ada dengan sebelumnya akan melakukan observasi lapangan untuk melihat kekurangan yang ada. Sehingga nantinya setelah mengetahui dimana terjadi permasalahan di lapangan maka DPC PKB bisa melakukan tindakan yang tepat. Hal ini sesuai dengan

pernyataan dari Abdillah Nasih sekretaris DPC PKB yang menyatakan bahwa:

“Nah jadi nggak di DPC PKB tapi di lingkup pemerintahan daerah. Kesadaran berkonstitusi atau isu-isu penyalahgunaan konstitusi ya terutama, ini memang selalu ada bahasan menarik tiap tahun, tiap ada forum-forum besar partai, nggak cuma hanya di DPC aja ada bahasan khusus bagaimana cara untuk menanggulangnya dan dari isu kesadaran berkonstitusi tersebut mencari apa sih yang akan kita lakukan ketika terjadi banyak penyalahgunaan konstitusi tersebut. Seperti kemarin isu ijazah palsu wakil ketua DPRD Sidoarjo kan sudah terjadi. Yang kebetulan bukan menyangkut kader PKB. Ini yang membuat DPC PKB berusaha memonitoring dan mengambil betul kader-kader yang berpotensi dapat meningkatkan citra partai di hadapan masyarakat. Bukan malah sebaliknya merusak citra partai. (12 juni 2018)

Selanjutnya dalam pelatihan pendidikan kader pertama selama dua hari ini diisi dengan berbagai pendalaman materi serta juga diberikan penguatan citra diri kader. Kader partai yang mengikuti pendidikan kader pertama ini diberikan banyak bekal untuk mengetahui identitas dari diri kader yang nantinya akan bertugas atas nama partai. Mensukseskan program-program kepartaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Citra dari diri kader memegang peranan penting dalam menyangkut nama partai di masyarakat. Kader atau anggota harus benar-benar menjadi teladan dan contoh dimasyarakat agar senantiasa menjaga marwah partai. Bukan malah sebaliknya kader-kader yang merusak dan mencoreng nama baik partai.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Choirul Mukminin wakil sekretaris DPC PKB sekaligus ketua pelaksana pendidikan kader pertama di tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

“Untuk mencapai tujuan pendidikan kader ini panitia sudah merancang berbagai kegiatan atau pendalaman materi kepartaian seperti sejarah, ideologi dan platform PKB, Citra diri kader, strategi penguatan, geneologi politik NU, ideologi dan mabda' siyasiy, dan lain-lain. Diharapkan dalam pkp ini semua materi dapat di serap oleh kader atau anggota sehingga akan dapat memberikan bekal yang maksimal. pendidikan kader pertama ditunjukkan untuk anggota atau kader PKB baik di level kecamatan atau ranting. Sebagai bagian untuk memperkuat system kaderisasi di internal partai. Ini menjadi langkah awal bagi anggota atau kader untuk dapat memahami arah dan tujuan partai. Selain itu ideology dan mabda' siyasi prinsip dasar perjuangan juga menjadi bagian yang akan di sampaikan dalam pkp ini.” (28 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Choirul Mukminin selaku wakil sekretaris DPC PKB Sidoarjo bahwasanya dalam pendidikan kader pertama ini diperuntukkan untuk anggota atau kader di masing-masing kecamatan. Selain itu diharapkan dapat memperkuat internal partai. dalam pendalaman materi pendidikan kader pertama berbagai isu-isu permasalahan akan di sampaikan. Selain itu juga ada beberapa ideology dan prinsip dasar perjuangan partai yang menjadi bagian penting AD/ART partai juga disampaikan ke kader atau anggota. Prinsip dasar perjuangan partai juga selaras dengan tujuan partai dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi. Ada 9 poin dalam hal ini yang menjadi prinsip dasar perjuangan seperti kesadaran nasionalisme yakni pertautan antara perjuangan PKB dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Selain itu kesadaran sebagai mabadi khairo ummah (masyarakat yang unggul) yakni terjamin dan berkembangnya nilai luhur kemanusiaan. Kesadaran professional dalam memikul amanah yakni keahlian memegang amanat itu mensyaratkan kemampuan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat. Kesadaran pluralistik yakni berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai pancasila. Selain itu dalam prosesi penutupan seluruh kader dan anggota yang telah mengikuti pendidikan kader dari awal kegiatan harus juga mengikuti ikrar dan baiat sebagai bagian dari janji setia terhadap garis perjuangan partai untuk dapat membawa nama baik partai juga kelak.

Prosesi pembaiatan dalam pendidikan kader pertama menjadi penutup kegiatan. Seluruh kader mengikuti arahan pemandu membacakan ikrar janji untuk senantiasa siap berjuang demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945. Selalu setia kepada garis perjuangan partai yaitu; pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Ahlussunah wal jamaah senantiasa mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Sesuai pernyataan dari Abdillah Nasih wakil sekretaris DPC PKB yang menyatakan bahwa:

“Harapannya yang utama adalah dengan adanya kegiatan DPC PKB dapat mengetahui kesadaran berkonstitusi. jadi nggak Cuma anggota atau kader DPC PKB saja yang kesadaran berkonstitusinya ditingkatkan, namun juga kita semua masyarakat harus juga ikut dalam pelaksanaan kesadaran berkonstitusi untuk menunjang hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya dalam akhir kegiatan pendidikan kader pertama ini seluruh kader di baiat dengan janji setia dalam

perjuangan partai dan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikuti arahan langsung dari pengurus partai yang ditunjuk.” (12 Juni 2018)

Selanjutnya pernyataan dari M. Ainun Najib sebagai anggota atau kader sekaligus ketua Gerakan mahasiswa satu bangsa atau organisasi sayap partai menyatakan bahwa:

“Memang dari beberapa program kegiatan dari DPC PKB Sidoarjo yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran berkonstitusi saya pernah mengikuti pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan juga pernah menghadiri jaring aspirasi masyarakat. Gemasaba sebagai organisasi sayap partai selalu diundang dalam setiap acara yang dilaksanakan oleh DPC PKB, begitupun juga sebaliknya apabila gemasaba ada acara pasti kami juga mengundang DPC PKB. Iya seperti hubungan anak dan bapak mas” (3 mei 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara M. Ainun Najib selaku anggota atau kader sekaligus ketua gemasaba bahwa dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC PKB beliau selalu mendapat undangan dan selalu menyempatkan hadir mewakili kader-kader muda PKB atau gerakan mahasiswa satu bangsa (gemasaba) sebagai organisasi sayap partai. Selain itu gemasaba selalu mendukung apapun program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPC PKB Sidoarjo.

Pendidikan kader pertama dilaksanakan rutin setiap tahun. Di tahun 2018 ini DPC PKB sudah melaksanakan PKP pada tanggal 26-27 Februari 2018. Dengan adanya pendidikan kader pertama DPC PKB berharap kedepan untuk membentuk dan akan lahir anggota atau kader yang solid dan mampu menjadi mesin partai yang memiliki kecakapan politik dan sikap perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah.

Mampu menjadi kader yang dapat diandalkan sebagai mesin partai maupun dalam kontribusinya dalam kepemimpinan NKRI di semua level, serta mampu menjaga wibawanya dalam menghindari permasalahan yang akan diterima apabila menyalahgunakan aturan atau kode etik partai. Pendidikan kader pertama diyakini dapat membentengi anggota atau kader dari sikap dan perilaku dari luar yang dapat menjerumuskan kader terlibat masalah.

2. Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Selanjutnya, program kegiatan yang kedua yang dilakukan DPC PKB Sidoarjo dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi anggota atau kader adalah sosialisasi empat pilar kebangsaan. Mengingat ada beberapa hal yang mendasari kenapa sosialisasi ini sangat penting, diantaranya muncul indikasi kurangnya solidaritas antar warga Negara, dan mulai lunturnya

pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Nur Ahmad Syaifuddin selaku wakil ketua DPC PKB Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

“Untuk sosialisasi empat pilar ini sendiri kita menekankan kepada kader atau anggota untuk bisa sharing pengalaman dan dapat menyerap ilmu dengan anggota F-PKB MPR-RI mbak arzeti. Jika empat pilar ini tidak disosialisasikan secara terus menerus, dikhawatirkan empat pilar kebangsaan menjadi benda asing bagi masyarakat Indonesia. Pemahaman yang benar tentang pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sangat diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang berakibat masalah hukum nantinya. Sosialisasi ini perlu dan penting digencarkan agar menjadi ruh perilaku anggota atau kader khususnya masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”

(13 April 2018)

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Nur Ahmad Syaifuddin sosialisasi empat pilar perlu digencarkan untuk meminimalisir baik terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Empat pilar kebangsaan dapat menjadi penyangga kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota atau kader diharapkan dapat memahami dan menginternalisasikan empat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Selain itu juga dapat menguatkan jati diri kader dalam menangkal hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Abdillah Nasih sekretaris DPC PKB yang memberikan pernyataan bahwa:

“Untuk sosialisasi empat pilar ini sendiri kita menekankan kepada kader atau anggota untuk bisa sharing pengalaman dan dapat menyerap ilmu dengan anggota F-PKB MPR-RI sesuai dengan keputusan UU No. 27 dan 29 yang diperkuat dengan Inpres No. 6 tahun 2005. Dalam teknis pelaksanaannya menyesuaikan waktu reses kader f-pkb. Dan pada akhir-akhir ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2018 yang diisi langsung perwakilan F-PKB MPR-RI.

(25 April 2018)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Saudara Choirul Mukminin selaku wakil sekretaris DPC PKB Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

“Sedangkan sosialisasi empat pilar kebangsaan juga sangat penting untuk dilaksanakan mengingat luntarnya atau kurangnya pemahaman tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karenanya DPC PKB berinisiatif untuk memanggil pulang anggota DPR-RI ke dapilnya untuk memperdalam ke empat pilar tersebut karena sifatnya yang sangat penting dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

(28 April 2018)

Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini DPC PKB mengundang anggota DPR-RI fraksi PKB untuk dapat memberikan paparan agar anggota atau kader dapat semakin memahami kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai dasar membangun jati diri bangsa, mempertahankan etika budaya, menjaga kesatuan, dan keutuhan dalam perbedaan. Keragaman atau kebhinekaan masyarakat bangsa yang terdiri atas berbagai agama, kepercayaan, suku dan budaya adalah sunnatullah dan rahmat bagi semua bangsa Indonesia. Pilihan atas bentuk Negara kesatuan adalah pilihan politik bangsa, bukan karena ada desakan pesanan dari pihak luar. Pilihan Negara Kesatuan ini sudah menjadi kehendak dan semangat bangsa Indonesia sejak ribuan tahun silam.



Gambar 3. Sosialisasi empat pilar kebangsaan

Dari gambar tersebut. Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan DPC PKB Sidoarjo yang dilaksanakan pada 30 Maret 2018 dengan ini menghadirkan langsung kader PKB yang duduk di Fraksi PKB MPR-RI Arzeti Bilbina Setyawan, S.E atau bisa kader lain untuk saling bergantian sesuai dengan daerah pemilihannya. Program sosialisasi empat pilar kebangsaan merupakan hal yang penting dalam menguatkan jati diri dan identitas bangsa. Yakni, memahami dan menginternalisasikan empat pilar kebangsaan yang ada didalamnya

Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini dilaksanakan untuk membentengi kader atau anggota memperdalam pengetahuannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman tentang pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sangat penting dilakukan untuk betul-betul mengambil intisari dan manfaat dari empat pilar berbangsa, bernegara mengingat empat pilar tersebut tidak pernah terlepas dari kawalan dan perjuangan bersama dan menghindari permasalahan hukum serta dapat semakin meningkatkan kesadaran berkonstitusi dari anggota atau kader.

3. Jaring Aspirasi Masyarakat

Kegiatan yang ketiga adalah 343 jaring aspirasi masyarakat. Digelarnya kegiatan dalam waktu reses

tersebut dalam rangka menyerap aspirasi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. DPC PKB disini berperan preventif untuk mengawasi dan memonitoring anggota atau kadernya. Memantapkan sikap kader yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan bangsa ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Mampu menjaga hubungan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Abdillah Nasih selaku pengurus DPC PKB dan anggota DPRD yang mengatakan bahwa:

“Sebagai salah satu kegiatan yang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat, maka ini penting apakah DPC PKB sudah mengakomodir kepentingan masyarakatnya. Seperti saya ini mas, selain sebagai pengurus PKB saya juga sebagai anggota dewan pada saat reses selalu menyempatkan untuk berbaur dengan masyarakat melalui jaring aspirasi masyarakat. Reses dilakukan selama tiga kali dalam setahun. Kemaren kebetulan pada saat reses tanggal 6-10 April saya mengadakan jaring aspirasi masyarakat. Mengingat saya dari daerah pemilihan Waru, ya saya melaksanakannya di Waru mas. Sesuai dengan dapilnya masing-masing. Hadir dalam kesempatan itu selain masyarakat desa bungurasih setempat, juga aparatur desa baik kades, BPD, Kepala dusun, ketua RT maupun organisasi kepemudaan yang ada didesa. Giat jaring aspirasi yang digelar di gedung pertemuan desa secara sederhana disambut baik oleh masyarakat setempat. Kalau acaranya di hotel kesannya terlalu formal mas, dikhawatirkan warga yang menyampaikan uneg-unegnya jadi sungkan. Meskipun ada persoalan yang diungkap warga didominasi keluhan mengenai infrastruktur jalan.”
(25 April 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdillah Nasih beliau menyatakan bahwa jaring aspirasi masyarakat ini dilaksanakan langsung oleh kader yang dimonitoring langsung oleh DPC PKB untuk melihat secara preventif kader-kadernya yang terjun langsung ke masyarakat. Sebagai pengurus DPC PKB yang sekaligus sebagai anggota dewan Bapak Abdillah Nasih juga melaksanakan langsung jaring aspirasi masyarakat di seputar daerah pemilihannya atau tepatnya di wilayah Waru pada tanggal 6-10 April lalu.



Gambar 4. Kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat Bapak Abdillah Nasih di Waru

Kegiatan tersebut juga mewajibkan anggota dewan utamanya dari PKB untuk dapat memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian. Pernyataan tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Nur Ahmad Syaifuddin selaku wakil ketua DPC PKB Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

“Kesadaran berkonstitusi dari seorang kader dapat dilihat dari kegiatan interaksinya dengan masyarakat yang diwakilinya. Di DPC PKB saat ini ada 13 kader yang duduk di kursi legislatif dan akan dimonitoring langsung pengurus DPC PKB saat melakukan kegiatan ini. Saya dulu sebagai anggota dewan juga melakukan kegiatan jaring aspirasi masyarakat. Mengingat ini dilaksanakan sangat penting untuk menjaga hubungan interaksi, silaturahmi baik menyerap dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Karena selain menumbuhkan rasa kekeluargaan juga giat tersebut bisa terjalin silaturahmi yang lebih baik. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk dapat mengawal bersama-sama pembangunan yang ada didaerahnya bisa terealisasi, berjalan dengan baik dan memberikan impact dan output yang maksimal. Untuk itu harus ada komunikasi yang baik dengan masyarakat.” (13 April 2018)

Selanjutnya pernyataan dari M. Ainun Najib sebagai anggota atau kader sekaligus ketua Gemasaba atau organisasi sayap partai menyatakan bahwa:

“Saya juga pernah menghadiri kegiatan jaring aspirasi masyarakat. Termasuk kegiatan yang dilakukan oleh cak Nasih dalam jaring aspirasi masyarakat. Kegiatan ini berkaitan dengan menjaga hubungan dengan masyarakat yang diwakilinya. Gemasaba sebagai organisasi sayap partai selalu diundang dalam setiap acara yang dilaksanakan oleh DPC PKB, begitupun juga sebaliknya apabila gemasaba ada acara pasti kami juga mengundang DPC PKB. Iya seperti hubungan anak dan bapak mas.” (3 Mei 2018)

Dari program kegiatan pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan sampai jaring aspirasi masyarakat selalu menyempatkan untuk hadir. Selain itu gemasaba selalu mendukung apapun program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPC PKB Sidoarjo.

Melalui kegiatan jaring aspirasi masyarakat saat reses ini untuk memperjuangkan kebutuhan sekaligus keinginan masyarakat banyak yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Ini yang menyebabkan masyarakat dapat menaruh harapan pada dewan yang dipilihnya sehingga bentuk kesejahteraan dalam kehidupan dapat dirasakan oleh masyarakat. Ini yang menjadikan tolak ukur dalam keberhasilan anggota atau kader PKB dalam komunikasinya dengan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan wakil ketua DPC PKB dalam jaring aspirasi masyarakat diikuti oleh 13 kader seperti berikut ini:

Dapil	Kecamatan	Jumlah Kader			
		'99	2004	2009	2014
I	Sidoarjo	1	2	1	3
	Candi	1			
	Tanggulangin				
II	Porong	1	3	2	3
	Prambon	1			
	Jabon	1			
	Kremlung	1			
III	Tulangan	1	2	2	2
	Sukodono				
	Wonoayu				
IV	Krian	1	3	2	1
	Balongbendo				
	Tarik	1			
V	Taman	1	3	1	2
	Waru	1			
VI	Gedangan	1	3	2	2
	Buduran	1			
	Sedati	1			
	Jumlah	14	16	10	13

Dari data kader atau anggota PKB Sidoarjo yang duduk di kursi dewan sebanyak 13 orang dalam periode 2014-2019 sekarang ini. Pengurus DPC PKB Sidoarjo mengawasi dan memonitoring berbagai kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh anggota atau kadernya. Dengan adanya kegiatan diharapkan masyarakat bisa pro aktif dengan melaporkan kepada anggota dewan apabila ada permasalahan yang belum bisa diselesaikan. Sebagai anggota atau kader DPC PKB dituntut memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menyerap aspirasi masyarakat Sidoarjo. Tanggung jawab ini untuk dapat meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi anggota atau kader dalam menjalin hubungan dan interaksi dengan masyarakat luas.

Kendala yang dihadapi DPC PKB Sidoarjo dalam meningkatkan proses kesadaran berkonstitusi pada anggota atau kader

Setiap ada kegiatan program pengembangan tentunya juga terdapat kendala-kendala yang menghambat proses daripada kegiatan tersebut. Begitupun juga upaya pengurus DPC PKB di dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada kader atau simpatisan. Kendala tersebut biasanya berasal dari kader atau simpatisan itu sendiri atau bahkan berasal dari

lingkungan sosial masyarakat yang kurang mendukung. Bapak Nur Ahmad Syaifuddin, selaku Wakil Ketua DPC PKB bidang kaderisasi menyatakan bahwa:

“...Di dalam kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan kesadaran berkonstitusi yang pasti ada kendalanya mas. Mengenai kendala-kendala dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi. Kendala yang paling umum dihadapi pengurus termasuk saya disini ya berasal dari kader atau simpatisan itu sendiri. Kan tidak semua kader atau simpatisan yang memiliki pandangan pemikiran yang sama. Sehingga ini menjadi tantangan bagi pengurus DPC PKB untuk memberikan arahan bagi mereka bahwa dalam satu partai harus satu suara. Meskipun demikian apapun harus dihargai kalau tidak ada yang berbeda pendapat, dimana letak politiknya mas. Selanjutnya hambatan yang saya rasa dikarenakan minimnya sumber dana yang dipunyai oleh partai politik. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik telah disebutkan adanya Dana Politik untuk partai politik dalam melaksanakan kegiatan kepartaian. Pengurus berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi minimnya dana tersebut...” (13 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Ahmad Syaifuddin, selaku Wakil Ketua DPC PKB Sidoarjo bidang kaderisasi bahwa kendala yang di hadapi ada dua hal kendala yang pertama adalah berasal dari anggota atau kader itu sendiri. Setiap anggota atau kader tentunya memiliki pandangan pemikiran yang berbeda. Sehingga akan menimbulkan ketidakcocokan pendapat. Ini yang akan coba diminimalisir DPC PKB Sidoarjo. Memberikan arahan yang tentunya akan berdampak juga pada perspektif anggota atau kader. Kendala lain adalah sarana dan prasarana mengingat kantor DPC PKB ini menjadi satu atap dengan kantor PCNU. Oleh sebabnya jika ada agenda kegiatan yang berbarengan. Salah satu harus ada yang mengalah.

Kendala kedua yang dihadapi yaitu minimnya dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan kepartaian. Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Partai politik akan mendapat suntikan dana dari Negara. Tapi tentu semua itu masih kurang untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Dari hal inilah pengurus DPC PKB berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menutupi kurangnya anggaran kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi. Artinya masih dibutuhkan donatur baik dari anggota atau simpatisan untuk sama-sama berjuang membesarkan partai, salah satunya dengan menghidupi kegiatan kepartaian tersebut. Selanjutnya Bapak

Abdullah Nasih. Selaku sekretaris DPC PKB Sidoarjo menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada anggota atau kader itu ada beberapa hal yang membuat saya terkendala mas. Kendala yang pertama yang saya hadapi disini ya berasal dari sumber daya manusia (SDM), terutama anggota atau kader. Di Sidoarjo ini mayoritas masyarakat lebih condong untuk sama-sama bersama PKB. Ini menjadi kendala sekaligus tantangan mas, agar apa yang telah diamanatkan mereka masyarakat kepada PKB bisa berbalas dengan kerja keras yang nyata. Sehingga disini kami lebih memfokuskan kepercayaan dari masyarakat. Selanjutnya yang menjadi kendala adalah maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merupakan permasalahan klasik di Indonesia. Ini yang dapat menyebabkan anggota atau kader untuk berpikir dua kali kalau misalkan terjun bidang politik.” (25 April 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdullah Nasih. Selaku sekretaris DPC PKB Sidoarjo bahwa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi adalah sumber daya manusia (SDM) yang mayoritas bersama PKB. Oleh sebabnya setelah mendapatkan kepercayaan masyarakat Sidoarjo. Sehingga kepercayaan dari masyarakat ini jangan disalahgunakan. Sudah seharusnya PKB juga harus berbuat yang terbaik kepada masyarakat. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan membekali dan melatih kader misalkan dengan pendidikan kader utama dan lain-lain.

Kendala selanjutnya yang dihadapi adalah berasal dari permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadikan calon anggota atau kader menjadi berpikir dua kali sebelum akhirnya terjun ke bidang politik. Berbagai langkah hukum telah dilakukan untuk mencegah terjadinya KKN. Namun, tetap saja angka KKN di Indonesia tetap tinggi. Bahkan dari total 175 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-12 sebagai Negara terkoriup di dunia menurut olahan data tahun 2014. Sebagai langkah pencegahan dari awal DPC PKB berusaha semaksimal mungkin untuk membentengi anggota atau kader dengan langkah-langkah preventif termasuk mengadakan berbagai program kegiatan misalkan pendidikan dan pelatihan bagi kader.

Selanjutnya Saudara Choirul Mukminin selaku wakil sekretaris sekaligus ketua pelaksana kegiatan pendidikan kader pertama 2018 menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan pendidikan kader pertama ada beberapa faktor baik dari dalam maupun luar yang menjadi kendala mas. Dalam pelaksanaan di hari H masih dijumpai minimnya konsumsi baik itu makanan maupun minuman. Selain itu

juga kurang kompaknya panitia dalam rapat pembahasan berjalannya kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan. Tapi untungnya kendala tersebut dapat dicarikan solusinya dan diselesaikan dengan baik mengingat masih dalam koridor yang wajar.” (2 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara dengan saudara Choirul Mukminin selaku wakil sekretaris DPC PKB bahwa kendala dalam pendidikan kader pertama juga dapat dijumpai pada saat hari H. Meskipun begitu beliau menganggap masih dalam tahap yang wajar. Kekompakkan dari panitia dan pengurus juga dibutuhkan dalam melaksanakan berbagai program kegiatan kedepannya. Selanjutnya saudara M. Ainun Najib selaku anggota atau kader sekaligus sebagai Ketua Gemasaba (organisasi sayap partai) menyatakan bahwa:

“Umumnya kendala yang dihadapi disini dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi ada dua mas. Pertama yaitu jelas dari anggota atau kader itu sendiri. Anggota atau kader muda disini masih kurang berpengalaman. Dan yang kedua adalah kurangnya menggunakan fasilitas kantor DPC PKB Sidoarjo padahal disini sudah tersedia layanan WIFI. Sebagai ketua organisasi sayap partai saya sering ke kantor DPC PKB meskipun hanya sekedar ngobrol dan bercengkerama dengan orang-orang di sekitar kantor.” (22 Mei 2018)

Berdasarkan wawancara dengan saudara M. Ainun Najib selaku anggota atau kader sekaligus sebagai ketua gemasaba adalah bahwa kendala datang dari anggota atau kader itu sendiri. Yang kurang mengupdate informasi dengan adanya program kegiatan DPC PKB. Selain itu juga anggota atau kader kurang memanfaatkan layanan wi-fi di kantor DPC PKB. Adanya fasilitas wi-fi diharapkan dapat memberikan sebuah kemudahan bagi para anggota atau kader untuk mencari berbagai macam informasi.

PEMBAHASAN

Sikap Kesadaran berkonstitusi dapat diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga Negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi dapat disebut warga Negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi. Dalam upayanya meningkatkan kesadaran berkonstitusi DPC PKB Sidoarjo berpedoman kepada UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKB.

Kesadaran berkonstitusi menjadi elemen yang sangat penting untuk mendukung proses demokrasi di era sekarang ini. Kesadaran berkonstitusi diharapkan mampu

menjadi solusi mengingat akhir-akhir ini muncul indikasi kurangnya solidaritas antar warga Negara, dan mulai lunturnya pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial dan politik yang terjun langsung kemasyarakat untuk membantu meningkatkan kesadaran berknstitusi dan membantu dalam masalah sosial. Beberapa kegiatan telah dilakukan DPC PKB Sidoarjo dalam upayanya meningkatkan kesadaran berkonstitusi dan kegiatan membantu sesama. Pada tahun 2017-2018 ada tiga kegiatan yang dilakukan DPC PKB dalam upayanya meningkatkan kesadaran berkonstitusi.

Kegiatan tersebut adalah pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan jaring aspirasi masyarakat yang ketiganya telah dilakukan selama dua tahun terakhir ini. Kegiatan tersebut setiap tahunnya menggunakan tema yang berbeda-beda menyesuaikan kondisi yang terjadi saat itu dan melalui kesepakatan semua pengurus DPC PKB Sidoarjo. Dari hal inilah dengan adanya pendidikan kader pertama DPC PKB berharap kedepan untuk membentuk dan akan lahir anggota atau kader yang militan, solid dan mampu menjadi mesin partai yang memiliki kecakapan politik lokal dan sikap perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah. Mampu menjadi kader yang dapat diandalkan sebagai mesin partai maupun dalam kontribusinya dalam kepemimpinan NKRI di semua level. PKP juga sebagai benteng untuk menghindari dan mencegah masalah-masalah hukum seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang nantinya akan berdampak negatif bagi anggota atau kader mengingat sudah menjadi agenda nasional yang tertulis dalam AD/ART PKB.

Selanjutnya kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan sebagai bagian program kegiatan yang dilakukan oleh DPC PKB dengan mendatangkan anggota MPR-RI ataupun yang berwenang terjun dalam daerah pemilihannya. Dalam hal ini DPC PKB Sidoarjo mengundang langsung untuk terjun ke dapilnya Anggota atau kader Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR-RI, Arzeti Bilbina Setyawan dan Syaikhul Islam saling bergantian memberikan pemaparan mengenai empat pilar kebangsaan pada ratusan anggota atau kader pemula PKB Sidoarjo yang berlangsung di aula Kantor DPC PKB Sidoarjo.

Ada beberapa faktor yang mendasari kenapa sosialisasi empat pilar kebangsaan ini sangat penting dilaksanakan. Diantaranya muncul indikasi kurangnya solidaritas antar warga Negara, dan mulai lunturnya pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mengedukasi anggota atau kader sehingga dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan

dengan empat pilar kebangsaan untuk menunjang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Program kegiatan yang ketiga adalah jaring aspirasi masyarakat. Digelarnya kegiatan ini dalam rangka reses anggota atau kader tersebut. Sebagai bagian menyerap aspirasi terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. DPC PKB disini berperan preventif untuk mengawasi anggota atau kadernya. Melalui kegiatan jaring aspirasi masyarakat saat reses ini untuk memperjuangkan kebutuhan sekaligus keinginan masyarakat banyak yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, perekonomian rakyat dan lain-lain.

Pelaksanaan jaring aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan kader. Disana DPC PKB berperan mengawasi dan mengedukasi anggota atau kadernya. Dalam jaring aspirasi masyarakat tersebut, permasalahan masalah yang paling dikeluhkan masyarakat banyak memiliki kesamaan. Sejumlah keluhan masyarakat yang berhasil dihimpun diantaranya, rusaknya jalan-jalan lingkungan disekitar pedesaan. Begitu juga infrastruktur lainnya seperti gorong-gorong, system drainase. Selain itu di beberapa daerah sering terjadi banjir akibat sungai yang meluap.

Penelitian ini juga ingin mengungkap kendala DPC PKB dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada anggota atau kader dilihat dari program kegiatan pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan jaring aspirasi masyarakat yang telah dilakukan selama periode kepemimpinan 2016-2021 yang masih berjalan sekarang ini. Kendala yang terjadi pada umumnya berasal dari pola perkembangan pola pikir kader, minimnya dana parpol dan masih maraknya terjadi korupsi, kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa peran DPC PKB dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi yang dilihat melalui program kegiatan pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan jaring aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa DPC PKB Sidoarjo telah berperan dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi.

Dari hasil penelitian tentang peran DPC PKB dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi dikaitkan dengan teori terkait yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori peran Biddle & Thomas. Biddle & Thomas mengemukakan lima konsep tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran :

1. *Expectation* (harapan)

Dari penelitian ini harapan orang lain, kader, simpatisan atau masyarakat pada umunya kepada yang memiliki peran yaitu Pengurus DPC PKB Kabupaten Sidoarjo adalah berharap bahwa DPC PKB selalu melakukan tugasnya sebagai organisasi sosial politik yang terjun langsung ke dalam masyarakat dan selalu

berinteraksi sosial dengan melakukan kegiatannya yang setiap tahun dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar kedepannya.

Seperti yang diharapkan oleh Saudara M. Ainun Najib yaitu selaku kader atau simpatisan sekaligus ketua Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) yang berharap kedepannya kegiatan DPC PKB menjadi contoh buat organisasi sosial politik yang lain dengan bisa melakukan kegiatan untuk menunjang dan membekali kader atau simpatisan dengan sebaik mungkin. Saudara M. Ainun Najib telah mendukung kegiatan yang pernah dilakukan oleh DPC PKB yaitu Pendidikan Kader Pertama, Sosialisasi empat pilar kebangsaan, jaring aspirasi masyarakat. Kemudian harapan dari DPC PKB dari ketiga kegiatannya tersebut adalah agar dengan kegiatannya tersebut DPC PKB bisa tetap mengandalkan kaderisasi sehingga akan dapat juga meningkatkan kesadaran berkonstitusi dan memperbaiki tatatan politik yang dipandang masih ada yang berdampak negative.

Harapan DPC PKB Kabupaten Sidoarjo tersebut diwujudkan dengan melakukan tiga kegiatan yaitu Pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan jarring aspirasi masyarakat dengan hasil penelitian bahwa DPC PKB berperan dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi dengan ketiga kegiatan tersebut. Alasan dilakukannya ketiga kegiatan tersebut adalah karena kecintaannya kepada kader atau simpatisan sehingga DPC PKB ingin alam ini tetap asri dan tetap terjaga kelestariannya maka dilakukan ketiga kegiatan tersebut setiap tahunnya dengan tema kegiatan yang berbeda-beda sesuai isu lingkungan yang sedang terjadi saat ini. Maka penggunaan kegiatan Pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan jarring aspirasi masyarakat sudah tepat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi dalam upaya membekali /menghindari kader atau simpatisan dari permasalahan hukum nantinya.

2. Norm (norma)

Norma adalah aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Norma berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia dalam bertingkah laku. Jadi norma atau aturan dasar dan aturan rumah tangga dalam DPC PKB digunakan agar setiap kegiatan itu sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, tidak memberikan kesan negatif dalam masyarakat ketika DPC PKB melakukan kegiatannya.

Sebagai suatu kelompok organisasi sosial politik juga memiliki aturan yang harus dipatuhi semua anggotanya baik kader atau simpatisan, begitu pula dengan masyarakat juga memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan juga DPC PKB itu sendiri.

Hal itu dilakukan DPC PKB dalam melakukan setiap kegiatannya agar sesuai dengan yang semestinya atau agar DPC PKB memberikan kesan positif bukan negatif terhadap perilakunya. Seperti dalam jaring aspirasi masyarakat.

Tiap anggota atau kader harus bisa menjaga hubungannya dengan masyarakat luas. Oleh sebab itu ketika DPC PKB akan melakukan kegiatan maka tidak boleh melanggar norma dan aturan yang sudah berlaku di masyarakat agar kedepan nantinya juga tidak ada yang mendapat hukuman dan sanksi dari masyarakat. Prinsip dasar perjuangan (mabda' siyasi) harus di ke depankan. Kesadaran nasionalisme yakni pertautan antara perjuangan PKB dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, kesadaran sebagai mabadi khairo ummah (masyarakat yang unggul) yakni terjamin dan berkembangnya nilai luhur kemanusiaan, kejujuran, kebenaran dan keterbukaan. Kesadaran pluralistic yakni berbagai suku, ras, dan agama, tatanan kehidupan harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Pancasila.

3. Performance (wujud perilaku)

Peran diwujudkan dalam perilaku aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini nyata, bukan sekedar harapan. Berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Dimana dalam penelitian ini peran dari DPC PKB sendiri diwujudkan dengan melakukan kegiatan-kegiatannya selama ini. Hal tersebut termasuk dalam wujud perilaku peran DPC PKB tergolong dalam jenis hasil kerja.

Kegiatan yang pertama adalah pendidikan kader pertama, Kegiatan itu dilakukan karena sudah menjadi kebutuhan partai. Pendidikan kader pertama merupakan system kaderisasi yang dirancang dan diterapkan di PKB sebagai bagian dari kebutuhan partai yang modern dan memiliki landasan akidah yang kuat yakni akidah aswaja (Ahlussunah Wal Jamaah).

Program pendidikan kader pertama diperuntukkan bagi seluruh anggota atau kader PKB baik di level kecamatan dan ranting struktural maupun non struktural. Dengan harapan adanya program kegiatan PKP ini bertujuan untuk membentuk kader yang militant, solid dan mampu menjadi mesin partai yang memiliki kecakapan politik lokal dan sikap serta perilaku yang mencerminkan akhlakul karimah.

Menjadi anggota atau kader-kader yang dapat diandalkan memberikan kontribusi dalam kepemimpinan Negara Kesatuan Republik Indonesia di semua level. Mengingat pendidikan kader pertama sudah menjadi agenda konsolidasi nasional dan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKB hasil muktamar terakhir tahun 2014 di Empire Palace Surabaya.

Selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan sebagai bagian kegiatan yang dilakukan oleh DPC PKB dengan mendatangkan anggota MPR-RI ataupun yang menjadi daerah pemilihannya. Dalam hal ini Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR-RI, Arzeti Bilbina Setyawan dan Syaikhul Islam saling bergantian memberikan pemaparan mengenai empat pilar kebangsaan pada ratusan anggota atau kader pemula PKB Sidoarjo yang berlangsung di Jl. Erlanga aula Kantor DPC PKB Sidoarjo.

Ada beberapa faktor yang mendasari kenapa sosialisasi empat pilar kebangsaan ini sangat penting dilaksanakan. Diantaranya muncul indikasi kurangnya solidaritas antar warga Negara, dan mulai luntarnya pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh karenanya sosialisasi dipandang perlu guna dapat memahami dan menginternalisasi wujud empat pilar kebangsaan. Apalagi sosialisasi empat pilar kebangsaan ini diperuntukkan bagi anggota atau kader pemula agar mereka dari dini sudah mengetahui dan memahami pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kegiatan ketiga adalah jaring aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan kader. Disana DPC PKB berperan mengawasi dan mengedukasi anggota atau kadernya. Dalam jaring aspirasi masyarakat tersebut, permasalahan masalah yang paling dikeluhkan masyarakat banyak memiliki kesamaan. Keluhan-keluhan dari masyarakat akan diteruskan kepada pemerintah daerah untuk setidaknya dapat ditindaklanjuti. Sehingga harapan ke depan akan ada sinergitas perencanaan antara kader partai dengan masyarakat. Masyarakat akan mengawal usulan-usulan permasalahan. Sehingga akan semakin menambah dan meningkatkan kesadaran berkonstitusi kader dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Kendala yang pada umumnya dialami DPC PKB dalam mengadakan serangkaian kegiatan seperti Pendidikan Kader Pertama adalah kondisi pola pikir kader yang berbeda-beda, dana parpol yang masih minim, serta maraknya pemberitaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang bias menghambat program kegiatan.

4. *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi)

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. *Evaluation* DPC PKB Sidoarjo sendiri adalah dalam penelitian ini evaluasi yang telah dilakukan DPC PKB sendiri adalah selalu berupaya untuk memperbaiki kegiatan dari yang sebelumnya. Seperti dalam kegiatan pendidikan kader

pertama yang dilaksanakan tahun ini. Ketua pelaksana DPC PKB akan melakukan rapat untuk membahas sejauh mana kegiatan yang sudah dilakukan, apakah ada kekurangan yang memang harus diperbaiki untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan agar selanjutnya tidak terulang kembali.

Rapat dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan kegiatan berlangsung untuk memastikan kurangan dalam kegiatan. Seperti dalam kegiatan pendidikan kader partai sebagai ketua pelaksana Saudara Choirul Mukminin menyatakan bahwa ada kendala yang dialami olehnya. Kendala tersebut adalah kurangnya dana sehingga dia harus memutar otak meminta bantuan kepada kader atau simpatisan temannya untuk menambah perbendaharaan saldo mereka. Kemudian untuk kendala yang kedua adalah kurang kompaknya anggota mereka setiap diadakannya rapat pembahasan kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Namun tidak hanya itu saja kendala yang dialami oleh Saudara Choirul Mukminin.

Pada saat hari H kegiatan Choirul Mukminin dan teman-teman juga mengalami kendala yang tidak terduga seperti minimnya kesediaan konsumsi makanan dan minuman pada saat akan dilaksanakan dan kurangnya beberapa alat dan bahan yang mereka butuhkan. Tapi kendala tersebut masih bisa diatasi oleh Choirul Mukminin dan teman-teman dari Gemasaba. Oleh karenanya hal tersebut harus jadi catatan mereka agar kegiatan selanjutnya tidak terulang kembali.

Namun dalam kegiatan tersebut DPC PKB dapat dikatakan masih sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi karena meskipun mengalami kendala pengurus DPC PKB masih tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Maka dari itu pendidikan kader pertama, sosialisasi empat pilar kebangsaan dan jaring aspirasi masyarakat harus tetap dilaksanakan setiap tahunnya karena dengan diadakannya kegiatan tersebut akan sangat berguna bagi kader atau simpatisan dengan kualitas dan kapabilitasnya akan semakin membaik khususnya bagi masyarakat luas juga. Dengan begitu jika kader atau simpatisan semakin mewarnai era demokrasi ini diharapkan kehidupan masyarakat juga akan ikut membaik.

Kemudian dari evaluasi tersebut akan ada yang namanya sanksi yang akan didapatkan ketika DPC PKB melakukan kegiatan tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dimasyarakat. Sanksi bisa datang dari luar dan dalam. Apabila kegiatan DPC PKB telah melanggar dari norma yang berlaku dimasyarakat akan mendapatkan sanksi dari masyarakat itu sendiri. Hal itu jika penilaian dan sanksi yang dilakukan dari luar. Contohnya kalau misalnya DPC PKB melakukan kegiatan ditempat umum yang mengganggu ketertiban

dan keamanan. Hal itu tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku maka nantinya DPC PKB akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Namun apabila ada sanksi dari dalam yaitu dari DPC PKB akan memberikan sanksi ketika ada anggota kader atau simpatisan yang melanggar atau berbuat tidak sesuai dengan norma.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah DPC PKB Sidoarjo memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada anggota atau kader melalui (a) pendidikan kader pertama, (b) sosialisasi empat pilar kebangsaan, dan (c) jaring aspirasi masyarakat. Ika secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, jaring aspirasi masyarakat dapat berperan dalam melihat kapasitas dan kapabilitas anggota atau kader dalam menerima keluhan-keluhan masalah dari masyarakat. DPC PKB memonitoring dan melakukan pengawasan dalam jaring aspirasi masyarakat ini. Adapun kendala yang di alami oleh DPC PKB Sidoarjo dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi antara lain adalah kondisi perkembangan pola pikir kader, dana parpol yang masih minim serta maraknya kasus KKN. Kendala tersebut tidak terlalu menghambat pelaksanaan kegiatan program. Hanya saja akan menjadi bahan evaluasi di kemudian hari agar berbagai kegiatan program partai dapat terlaksana dengan maksimal.

Saran

Kepada DPC PKB disarankan mampu dalam hal mengembangkan dan mempertahankan cara-cara yang telah dilakukan selama ini dalam meningkatkan kesadaran berkonstitusi melalui program kegiatan-kegiatannya. diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai. Lebih memaksimalkan kegiatan dengan melakukan open rekrutment dari luar anggota atau kader agar program kegiatan lebih maksimal terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Muktamar di Empire Palace Surabaya 30 Agustus - 1 September 2014
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 1977. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. Pustaka Utama.
- Djamarah, Syaiful. 1997. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sarwono, S.W. 2002. Psikologi Sosial: *Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. 2013. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Soewarna. 1976. Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam kehidupan Politik Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

Subagyo, Firman. 2008. Menata Partai Politik: Dalam Arus Demokratisasi Indonesia. Jakarta: Wahana Semesta Intermedia.

Walgito, Bimo. 2010. Pengantar Psikolog Umum. Yogyakarta: C.V Andi.

